

REKONSILIASI AKAR RUMPUT UNTUK DEMOKRASI DAN HAM¹



Saiful H. Shodiq
Staf pada SYARIKAT
(Masyarakat Santri
untuk Advokasi Rakyat)
Jogjakarta

Sudah seminggu ini saya mendengar seorang anak buah Bung Tomo dalam masa revolusi di kota B, sakit sesak nafas. Bersama seorang dokter muda yang kebetulan datang dari Jakarta, saya berkunjung ke rumah kayunya yang rapuh. Kunjungan ini sebuah komitmen persaudaraan, penghormatan dari yang muda pada yang tua. Terlalu mulia, mungkin, untuk dikatakan demi kemanusiaan. Dan bukan lagi perjumpaan

untuk menggali cerita tentang perjuangan hidupnya sebagai seorang petani dan pejuang revolusi, pemimpin masyarakat dan organisasi petani, atau tentang partainya, hingga terjadinya tragedi 1965-1966.

Dalam kondisi yang hampir-hampir tidak dapat bernafas, ia menyambut kedatangan kami. Ia memaksakan diri untuk duduk di meja tamu dari kayu sengon yang telah reyot. Badan kurus, dua kaki bengkak dari jari-jari sampai lutut, dan dua mata memerah berair. Dengan sias-sisa tenaganya ia bangun dan berjalan. Jarak empat meter yang kian menambah berat sesak nafasnya. Sesaat setelah duduk di ruang tamu, ia menempelkan dahi pada meja tamu untuk mengatur nafas yang tersengal-sengal. Tiga menit kemudian ia menegakkan kepala dan berkomentar.

“Nak, tambah sesek saya”.

Saya dan dokter diam.

“Dulu Asmasoho masih bisa, sekarang tidak mempan. Kaki saya bengkak sampai lutut,” sambungnya seraya berusaha mengangkat kaki kanannya untuk diperlihatkan kepada kami.

Saya menoleh ke dokter itu untuk

¹ Untuk *editing* bahasa naskah ini, saya berterima kasih pada kawan Iip Dzulkifli Yahya, sedangkan untuk isi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

meminta pertimbangan. Ternyata upaya mengangkat kaki itu justru memperparah sesak nafasnya. Secara spontan, kami melompat untuk mencegahnya. Sekali lagi ia menempelkan dahi pada meja tamu. Kawan dokter itu mulai memeriksa kaki yang bengkak, meletakkan stetoskop pada dada bagian jantung, hati, bronchitis, dan di seputar tengkut tulang ketujuh.

Saya bertanya, "Gimana, dik? Bisakah membuat resep?"

Wajah dokter menunduk, "Sebaiknya ke rumah sakit, Mas!" Lalu ia berbisik, "Jantung." Tangan kirinya mengisyaratkan angka "4". Jantung stadium empat!

Menghadapi kenyataan hidup di depan mata, pikiran liar saya berputar ke mana-mana. Dalam kondisi sakit jantung akut, apa yang membuat orang ini dapat bertahan hidup? Mungkinkah almarhum kakek buyut saya yang Rais Syuri'ah NU, paman-paman yang aktifis GP. Ansor dan IPNU, juga ibu yang sekarang menjadi pengurus Muslimat Cabang, apakah tahu tentang dunia orang-orang yang dihilangkan dari bangsa yang bernama Indonesia ini?

Sempat terpikir tentang anak-anaknya. Yang tertua misalnya, ditinggalkannya ke Pulau Buru sejak umur belasan. Si sulung bertahan hidup sebagai buruh di Jakarta dan tinggal di pemukiman kumuh yang musnah 'terbakar' belum lama ini. Kenistaan seorang mantan anak buah Bung Tomo ini melampaui batas kesengsaraan ekonomi. Rumah sakit, itulah yang segera kami tuju. Sesampai di rumah sakit, urusan belum selesai. Sekalipun terbukti sangat miskin, ternyata ia

tidak mendapatkan kartu sehat dari kelurahan. Katanya, apalagi kartu sehat, wong jatah beras murah saja tidak mendapatkan. Saya semakin tidak dapat berpikir, atas nama nilai apa sampai ada tindakan hukuman dan diskriminasi yang harus ditanggung mantan pejuang nasional ini. Seumur hidup. Haknya sebagai orang miskin, kehancuran harga diri sebagai penanggungjawab keluarga atas anak dan istri, dan dialienasikan tanpa batas yang bisa dilukiskan. Mungkin pemberontakan jiwanya satu-satunya semangat yang tersisa, yang membuatnya bertahan agar tidak mati seperti ayam!

Peristiwa 1965-1966 sebagai Tragedi Kemanusiaan

Ilustrasi panjang di atas adalah salah satu realitas pahit yang hadir di tengah kita. Satu fragmen gelap dari Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 (TK-'65-'66), tragedi besar sebuah bangsa 'beradab', bagian dari sekian pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini. Cerita tentang anak buah Bung Tomo itu menjadi contoh, bagaimana Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 berlanjut dengan proses dehumanisasi yang bertanggung seumur hidup. Tidak hanya para korban yang dipenjarakan, di Nusakambangan atau Pulau Buru. Istri, anak, menantu, menanggung akibat pemberangusan dan diskriminasi hak-haknya sebagai warga negara.

Pada umumnya ada dua tipe korban politik di Indonesia. *Pertama*, korban politik dengan korban masyarakat sipil, yang menempatkan negara sebagai pelaku tunggal. Corak konfliknya vertikal, seperti

kasus DI/TII, Tanjung Priok, Warsidi Lampung, Haur Koneng, dan sebagainya. Kedua, korban politik dengan korban masyarakat sipil, yang menempatkan negara dan masyarakat sipil yang lain sebagai pelaku. Corak konfliknya vertikal sekaligus horizontal, seperti kasus pembunuhan atas orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI tahun 1965-1970. Tipe penyelesaian konflik kedua ini tidak cukup melalui peradilan HAM. Karena di dalamnya melibatkan masyarakat sipil sebagai pelaku, diperlukan rekonsiliasi di kalangan masyarakat sipil yang terlibat dalam konflik itu.

Dalam realitas politik Indonesia saat ini, terdapat tuntutan yang sangat kuat di kalangan masyarakat "korban" politik dari rezim masa lalu, untuk memperoleh hak-hak politik dan sipilnya. Kata "korban" di sini perlu diberi tekanan, karena pada kenyataannya banyak sekali korban politik di Indonesia, dengan latar belakang kasus dan rentang waktu yang berbeda.

Tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok korban yang berbeda, saat ini masih berserak-serak, belum tampak sebagai satu usaha untuk rekonsiliasi nasional yang menyeluruh. Apalagi di dalam sebagian masyarakat sendiri, terdapat perbedaan persepsi yang sangat jauh mengenai kesalahan masa lalu dengan pihak-pihak yang dianggap "pelaku". Belum ditemukan jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua pihak yang sesungguhnya sama-sama korban itu. Karena itulah dirasakan perlu untuk dirintis bersama-sama, untuk menatap masa depan yang lebih baik,

dengan jaminan tidak ada lagi korban politik.

Tragedi Kemanusiaan 1965-1966, bagaimanapun harus mendapat perhatian khusus dalam upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi korbannya. Alasan pengambilan fokus pada momentum tersebut, antara lain: *Pertama*, tragedi ini mempunyai skala besar dari segi cakupan area dan jumlah korban. *Kedua*, pembunuhan itu disertai stigmatisasi pascaperistiwa yang tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi terhadap keluarganya. Tidak hanya dalam pengertian *nucleus family* tetapi juga mencakup *extended family*. Stigmatisasi itu berjalan sangat lama, bahkan akan berjalan lebih lama lagi ke masa depan jika tidak teratasi pada periode sekarang. *Ketiga*, corak stigmatisasi tersebut tidak semata-mata ideologis, tetapi juga merembet kepada penghilangan hak-hak sipil dan politik secara massif dan berganda (*multiple victimation*) karena menyangkut *extended family*. *Keempat*, tragedi itu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain sebagai pelaku, yang melibatkan segmen terbesar bangsa ini, yakni umat Islam. Dalam kaitan ini, konflik memperoleh dasar pembenaran teologisnya. *Kelima*, hingga saat ini belum ada inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, khususnya dari Nahdlatul Ulama, dan Ormas Islam lain, untuk mendukung proses rekonsiliasi dan rehabilitasi korban politik Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 tersebut.

Secara spesifik, kata *rekonsiliasi* berarti perubahan sikap seseorang/kelompok terhadap tragedi yang telah terjadi pada

masa lalu, dengan cara memaafkannya sekaligus belajar dari masa lampau untuk tidak mengulangi kembali tragedi itu. Sementara kata *rehabilitasi*, adalah pemulihan hak-hak politik warga negara yang dilakukan oleh negara, karena negara terbukti bersalah melanggar hak asasi dan/atau membiarkan pelanggaran hak asasi itu terjadi terhadap seseorang atau sekelompok warga negaranya.

Menelusuri Tragedi Kemanusiaan 1965-1966

Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 tidak serta merta terjadi. Peristiwa tragis itu merupakan akumulasi proses berbangsa, bernegara dan bermasyarakat warga Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam rentang masa 20 tahun sejarah Indonesia, Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 itu bagaikan ujung simpang jalan dari seluruh fenomena transisi, terutama menyangkut dua hal. Pertama, pertumbuhan militer dan pencarian eksistensinya dalam konstelasi tata negara dan politik Indonesia. Kedua, transisi orientasi dan penataan ekonomi nasional Indonesia.

Polarisasi rentang kesejarahan Indonesia dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di atas, secara umum, dapat dilihat dari hasil pemilu 1955 yang menggambarkan warna dan peta sosial-politik di berbagai kota di Indonesia. Tipologi umum daerah/kota itu mencakup ruang politik formal pada jabatan publik, birokrasi, dan *grassroot*. Menyangkut keberadaan berbagai organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan organisasi kepemudaan (OKP) beserta

afiliasinya dengan partai-partai, baik langsung maupun tidak langsung.

Pertumbuhan militer di Indonesia sendiri memiliki kesejarahan tersendiri. Muncul dari perang semesta anti kolonial sampai kebutuhan penataan militer secara profesional. Dari sisi sosio-kultural sampai memasuki masa pascarevolusi fisik, militer Indonesia memiliki kedekatan dengan ruang partai politik. Hubungan kepentingan politik antara partai dan militer aliran/kelompok tertentu, menciptakan ciri militeristik dan militerisme di Indonesia. Hal ini yang di kemudian hari — sampai saat ini— menjadi ciri khas umum dari partai-partai besar di Indonesia.

Sementara dasar keberadaan partai yang beragam dari yang berbasis aliran agama, etnis, maupun modern, dapat dicermati dari ruang dan cakupan variasi agenda propaganda dan kampanye mereka sesuai basis massanya masing-masing.



Setiap partai melakukan upaya dan proses propaganda untuk penguatan partai dan massa yang sama, dengan ruang dan bahasa politik yang beragam. Di sisi lain, Indonesia yang tumbuh bersama negara-negara pascakolonial lainnya, tak bisa lepas dari konstelasi politik internasional dalam spektrum perang-dingin. Konstelasi itu telah memberi warna pada transisi dalam negeri yang antara lain menempatkan paham sosialisme-komunisme sebagai satu alternatif yang lebih memiliki konteks bagi negara-negara pasca koloni.

Ruang kompetisi sipil (*civic competence sphere*) di dalam relasi antar partai, antar Ormas/OKP yang ada di level kota dan desa, bukan berarti tanpa konflik. Muncul berbagai ketegangan melalui adu program dengan bahasa proganda yang beragam, saling mengejek, unjuk massa (*show of force*) dengan *drumband*, pentas seni rakyat, dan lain-lain. Di sejumlah tempat bahkan sampai terjadi perkelahian dalam skala kecil.

Berkaitan dengan 'perkelahian' antar massa partai dengan skala konflik yang membesar, pada umumnya dapat dilihat dari sisi terus berlangsungnya tradisi *social bandit* di kota-kota tertentu dan tradisi paramiliter dalam masyarakat sipil (dari pola laskar ke kelompok paramiliter dalam partai yang sampai saat ini masih tetap berlangsung). Dua tradisi itu dapat dilihat sebagai akibat langsung dari mobilisasi perang semesta dalam masa revolusi fisik. Namun, dalam dinamika transisi sosial-politik, kedua tradisi itu dapat muncul bersamaan dan bersinggungan langsung dengan kepentingan partai untuk peng-

galangan massa.

Meski demikian, ada realitas lain yang dapat dilihat. Penyelesaian dan pendamaian potensi konflik di dalam kota/desa dapat dilakukan dalam *incognito agreement*, bahwa semuanya menganggap diri bagaikan *adu kuthut manggung!* Podium digelar di mana-mana dan mereka yang "bersuara merdu" yang akan didengar dan diikuti orang banyak. Hal ini diperkuat dengan efektifitas kebijakan politik resmi Soekarno dengan Nasakom dan Front Nasional. Dan adu jago, sebagaimana tampak pada banyak kekerasan/perkelahian dalam berpolitik yang terjadi akhir-akhir ini, adalah suatu peristiwa abnormal yang tidak perlu terjadi dalam ruang kompetisi sipil.

Maka jika ruang kebijakan politik resmi Soekarno dan kompetensi sipil bukan satu-satunya alasan untuk terjadinya kekerasan dan pembunuhan massal, bagaimana masyarakat menjelaskan proses konflik berkekerasan dapat terjadi dan berpuncak pada Tragedi Kemanusiaan 1965-1966? Atau dengan kata lain, bagaimana menelusuri fenomena yang abnormal dapat berubah menjadi satu keniscayaan dan disadari sebagai bagian dari sikap kepahlawanan pembela negara melawan penghianat bangsa? Atau Islam melawan atheis?

Peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 dan Perspektif Teori-Teori

Penelusuran teori-teori dalam melihat peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 bisa dilakukan dalam tiga level peristiwa. Dalam tataran *grassroot*, terjadi

pertumbuhan dan pergeseran sosial-budaya masyarakat pasca koloni². Di tingkat nasional, munculnya Indonesia sebagai negara bangsa telah mengakibatkan pergeseran kenegaraan dan kebangsaan yang krusial³. Sementara di tataran internasional, masa tahun 50-an sampai 60-an merupakan masa pertentangan keras dua kubu dalam perang dingin⁴.

Untuk melihat tiga level peristiwa dalam melihat Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 itu, dapat dikedepankan beberapa teori. *Pertama*, teori konspirasi politik internasional dalam spektrum perang dingin. Termasuk di dalamnya fenomena penghancuran Partai Komunis Malaya di Malasyia dan fenomena kebangkitan politik komunisme di Asia. *Kedua*, teori transisi sosial-ekonomi-politik nasional. Termasuk di dalamnya ketegangan politik yang muncul dari proses perebutan kekuasaan untuk aset ekonomi nasional Indonesia. Kemudian realitas transisi konsepsi tentang "kekuasan priyayi" dan kegagalan sosialisme di Indonesia, juga proses pertumbuhan militer dalam transisi politik di Indonesia. *Ketiga*, teori potensi konflik di dalam masyarakat sipil, dengan

tipologi kota maupun desa yang terkadang paralel dengan ruang teori kedua, tetapi lebih spesifik dan bervariasi.

Melalui —setidaknya— ketiga teori dalam tiga level/ruang peristiwa, dapat terlihat bagaimana peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 di Indonesia merupakan muara atau pertemuan ruang dan waktu dari seluruh pertentangan dan potensi konflik di semua level. Pertemuan ketiga ruang pertentangan dan potensi konflik itulah yang mampu menciptakan gelombang arus balik sejarah nasional.

Penelusuran teori-teori tentang peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 dalam tiga level/ruang peristiwa, di satu sisi diharapkan dapat menjadi dasar untuk meletakkan pemahaman proses yang menyeluruh, bahwa selalu terjadi hubungan dan relasi kepentingan antar aktor, baik dari luar atau dalam negeri Indonesia, dengan ruang momentum arus sejarah —mikro-makro— sebagai realitas yang menentukan, sampai terjadinya peristiwa dengan implikasi-implikasi lunak-kerasnya. Di sisi lain, penelusuran di atas juga diharapkan akan bermanfaat untuk melihat sejauh mana cakupan

² Perubahan dalam *grassroot* terutama berkaitan dengan pergeseran konsepsi priyayi dalam masyarakat, yang tidak hanya merujuk pada genealogi raja-raja, tetapi juga pada kemunculan tokoh yang berbasis pendidikan maupun karier kemiliteran (formal maupun dalam kelaskaran rakyat).

³ Pertumbuhan dan pertentangan makro politik terjadi sejak usulan penerapan Piagam Jakarta, sampai masalah penataan dan pengelolaan aset ekonomi nasional pascanasionalisasi aset.

⁴ Sebagai pembanding, dalam hal ini manuver politik Non-Blok dengan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, di satu sisi merupakan penegasan sikap negara-negara berkembang atas dua kubu perang dingin dunia. Sementara di dalam negeri, dengan membandingkannya dengan terwujudnya poros Jakarta-Peking di tahun selanjutnya, menunjukkan pertentangan orientasi politik untuk hubungan luar negeri dalam masa transisi politik nasional.

ketiga teori itu mampu melihat realitas lain sebagai *new civilization out put* dari peristiwa yang terjadi, dan bagaimana meletakkan pemahaman baru bagi kebutuhan untuk perubahan.

Pola Arus Umum Tragedi Kemanusiaan 1965-1966

Penelusuran data peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 menunjukkan adanya potensi konflik sipil di lokal kota yang mencakup tiga ruang utama: kepomongprajaan, perkebunan-pertanahan, dan kekerasan populer. Dalam tiga ruang potensi konflik, dapat dipetakan tiga isu pula yang berkembang dan mengiringi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di ruang kepomongprajaan, muncul isu seputar kudeta, pemberontakan, pengkhianat bangsa, maupun pembunuhan para jenderal (pahlawan revolusi), dan mendirikan negara atheis. Di ruang perkebunan-pertanahan, diiringi isu penyerobotan tanah, *suka-geser-geser* patok, dan seterusnya. Di ruang kekerasan populer, diiringi isu perampok, maling, suka kekerasan, penjarah hasil bumi, pembunuhan kiai (sebagai satu dari tiga setan desa), dan pembunuhan kiai berarti atheis.

Semua isu yang berkembang dapat dilihat sebagai bagian dari proses *psy-war* untuk desakralisasi PKI dan Ormas/OKP yang berafiliasi kepada PKI, dengan pola arus umum peristiwa sebagai berikut:

Sebab. Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 mencakup karakteristik potensi konflik sipil dalam tiga ruang utama di atas. Secara umum hal itu mewarnai

pertarungan kompetitif yang dialektis. Dalam ruang birokrasi —jabatan publik dan Ormas/OKP—, sisi kompetitif terjadi dalam melihat relevansi materi *agitprop* (agitasi propaganda) untuk perjuangan politik tertentu, yang berdialektika langsung dengan massa pendukung, dengan kepentingan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Persinggungan dialektis dalam masyarakat sipil tersebut, berubah menjadi semangat untuk menghilangkan kelompok politik lain yang berbeda, terutama sejak peristiwa pembunuhan tujuh jenderal di Jakarta.

Konflik. Kekerasan yang berpuncak pada Tragedi Kemanusiaan 1965-1966, secara umum dimulai pasca pembunuhan tujuh jenderal di Jakarta. Tradisi politik mobilisasi massa yang sebelumnya memiliki tujuan kompetisi dan dialektika antar partai dan massa, bergeser untuk penganyangan PKI dan anteknya sampai terjadinya pembunuhan massal. Pertemuan massal di gedung umum dan aula Kodim, rapat akbar di alun-alun dan lapangan, di kalangan sipil non-PKI menjadi lebih bermakna dan emosional. Di satu sisi didorong oleh pengalaman nyata massa dalam persaingan partai, dan massa dalam era politik liberal; di sisi lain diperkuat oleh munculnya proses desakralisasi atas intensitas dan identitas PKI dari citra progresif revolusioner bagi perjuangan bangsa, ke kontra revolusioner, pengkhianat bangsa, pemberontak, kudeta, atheis, pembunuh kiai, penyerobot tanah, dan seterusnya.

Dalam daerah/kota yang didominasi PKI, kedatangan militer —khususnya

RPKAD—, mem-*back up* langsung kekuatan sipil non-PKI. Seperti di Jawa Timur dengan NU-Banser dan PNI-Pemuda Marhaen, di Bali dengan PNI-Pemuda Marhaen, di Jawa Tengah dan DIY dengan PNI, Muhammadiyah-KOKAM. Di kota lain di Jawa Barat, dengan NU-Banser, IPKI, AMS, PNI non-Ali Surahman. Pergerakan massa sipil untuk pengganyangan PKI ini terbangun sejak mobilisasi umum oleh komando sipil dan militer, setelah terjadi pembersihan internal militer dari unsur merah⁵. Secara umum dilakukan dengan pola pengiriman ke perbatasan untuk konfrontasi dengan Malaysia lalu mereka dilucuti di lokasi. Juga dengan pola penangkapan jaringan intelijen militer seperti terjadi di Jawa Tengah.

Menarik untuk diperhatikan, terjadinya proses secara bersama antara: mobilisasi massa sipil non-PKI, latihan kemiliteran yang berpuncak pada pembentukan Front Pancasila sebagai tandingan Front Nasional, dan pembersihan militer merah dalam internal TNI. Kesemuanya itu kemudian menjadi titik awal dari seluruh rangkaian peristiwa: penangkapan, penahanan, pembunuhan, pencopotan jabatan publik, penyerobotan tanah, peng anuliran keputusan *land-reform*, penguasaan kembali perkebunan dengan penguasaan birokrasi administrasi, penggantian jabatan publik dan pember-

sihan birokrasi dari unsur PKI, sampai munculnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.

Akibat. Peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 terjadi dalam ruang struktural dan kultural. Munculnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, telah membunuh hak perdata (kewarganegaraan) korban dalam bernegara dan berbangsa, sekaligus menjadi dasar politik untuk memenjarakan dan membuang mereka ke Nusakambangan, Plantungan, Pulau Buru, atau penolakan kembalinya para *exil* dari luar negeri. Meski demikian, tipologi penangkapan umum terhadap mereka yang dituduh PKI tampak tak teratur, tanpa batasan yang pasti sesuai dengan *term* hukum yang berlaku. Banyak terjadi, tahanan kriminal menjadi tahanan politik atau sebaliknya. Dan lebih tak teratur lagi dalam hal pembuktian hukum.

Sementara dalam ruang kultural, didasarkan pada pemahaman dan pemaknaan atas proses desakralisasi yang berkembang, dengan anggapan umum bahwa seluruhnya benar dan menolak kebenarannya berarti bagian dari PKI, masyarakat korban menanggung akibat langsung dari sisi sosial-ekonomi-budaya. Dalam kurun awal peristiwa, pada sisi ekonomi, terjadi proses anulir atas kebijakan pertanahan dan perburuhan, juga pemaksaan untuk penyerahan tanah bagi tentara dan kelompok politik ter-

⁵ Kata 'merah', merujuk pada paradigma sosialis-komunis dalam *term* epistemologis dan dapat pula menjadi penanda bagi kesatuan tentara Soekarno.

tentu, secara institusional maupun secara personal. Fenomena umum ini, dapat pula dilihat sebagai satu jalan pintas untuk penyelamatan diri dan keluarga dari kematian atau penghancuran masa depan. Menjadi sejenis bayaran atau suap untuk sang pemenang (*sic!*). Hal ini merupakan pilihan yang paling minimal dan rasional daripada dipenjarakan, dibunuh atau dikeroyok massa. Fenomena umum itu pula yang ikut mewarnai hampir semua konflik pertanahan di Indonesia yang bersifat struktural, sampai saat ini, baik bersifat komunal/desa atau personal/keluarga *vis a vis* negara (pemda, perkebunan swasta, militer atau pemerintah pusat).

Dalam sosial-budaya, puncak kesuksesan proses desakralisasi, keluarga korban menanggung proses alienasi dalam interaksi sosial-budaya masyarakat sekitarnya. Hal ini terjadi sebab batasan 'siapa PKI' yang sangat longgar dan tak terkontrol; individual, keluarga, kelompok, organisasi, kartu anggota, penyumbang dana, teman, bekerja di ruang usaha milik simpatisan PKI, dan seterusnya; sekaligus menjadikan kemungkinan masuknya faktor sentimen antarpribadi mengenai perebutan jabatan, pacar/istri, tanah, dan lainnya. Sebaliknya, proteksi terhadap seseorang dari tuduhan PKI, dapat terjadi dalam batasan yang tak terbatas pula; menyuap, kekeluargaan, kolega bisnis, termasuk berbagai bentuk tindakan penyelamatan massal; migrasi, pemutusan hubungan keluarga secara administratif, berketu-loncat bekerjasama dengan sang pemenang dan menunjukkan siapa orang PKI yang dikenal, dan seterusnya.

Arus Sejarah dan Arus Baliknya

Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 menandai peralihan kekuasaan. Dengan melihat cara *tumpas-kelor* atau "tumpas seakar-akarnya" yang terjadi, peralihan kekuasaan telah berubah menjadi peralihan peradaban, atau dengan kata lain *civil war for a new civilization*. Perubahan arus sejarah dari rezim Soekarno ke Soeharto, menjelaskan bagaimana supra-infra struktur politik berubah drastis. Arus sejarah untuk Demokrasi Terpimpin dan Nasakom sebagai supra struktur politik atau pun Front Nasional sebagai kebijakan politik resmi negara, tiba-tiba berubah arah, sampai pada taraf penghancurannya. Meskipun hal ini terjadi, bukan berarti menandai gagalannya kebijakan politik resmi.

Perubahan politik secara drastis di tingkat makro politik tersebut, di tingkat lokal kota ditandai dengan terjadinya *peristiwa-penentu* dalam masyarakat yang sekaligus menandai dimulainya arus balik sejarah selanjutnya. Hasil investigasi peristiwa Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 di 18 kota yang menjadi garapan SYARIKAT menunjukkan, peristiwa



penentu di tiap kota, sangat beragam. Sebagai titik awal arus balik sejarah semua kota, ditandai dengan kehadiran militer secara fisik (sebagai supralokal). Atau munculnya *psy-war* untuk sakralisasi militer (kehadiran non-fisik). Kemudian berlangsunglah proses desakralisasi PKI dan massanya dalam bentuk: pemberitaan media, rumor, isu atau provokasi berkaitan peristiwa pembunuhan tujuh jenderal di Jakarta, pentas pelecehan Tuhan, pembunuhan kiai, daftar kiai hendak dibunuh, lubang buaya, dan sebagainya. Proses desakralisasi tersebut, dalam hal tertentu dapat terjustifikasi kebenarannya sebab terhubung dengan realitas ketegangan politik yang terjadi dan dialami antara PKI dan non-PKI pada masa pra '65, dalam tiga ruang kompetisi dan potensi konflik sipil. Bahkan pengalaman yang paling romantis pun, di belakang hari dapat digambarkan sebagai sesuatu tipu muslihat yang licik untuk menguasai jika saatnya tiba.

Kehadiran militer di 18 kota, tergambar dalam dua kegiatan utama; membersihkan militer dari unsur merah, lalu mengumpulkan, mengorganisir, memobilisasi, mem-*back up* dan memfasilitasi kelompok sipil non-PKI untuk melawan PKI, konflik dan pertikaian personal, sampai pertarungan institusional. Keberhasilan dalam pembersihan dan mensolidkan militer, juga membangkitkan sipil untuk anti PKI, menjadi permulaan dari penyerangan, penangkapan, penahanan, penggundulan sampai pembunuhan massal. Penggalangan dana dari pengusaha dan person-person pun terjadi,

yang dalam banyak kasus, menjadi lahan tawar-menawar harga politik bagi keselamatan semua pengusaha ataupun person-person yang kaya di kota terkait.

Rekonsiliasi dan Rehabilitasi untuk Demokrasi

Keniscayaan proses transisi dari otoriter ke (cita) demokratis, mensyaratkan penciptaan ruang publik yang bebas dan merdeka. Pada kenyataannya, transisi sosial-politik yang berjalan di Indonesia masih diselimuti oleh tindakan kekerasan dan implikasi-implikasinya, yang tersebar ke seluruh sendi kehidupan berbangsa bernegara. Sampai kini, belum ditemukan jalan lapang agar bisa keluar menuju sebuah bangsa yang demokratis, di mana setiap warga bebas berargumentasi sesuai dengan basis keyakinan dan ideologinya dalam sistem sosial yang *kohesif-agregatif*. Reformasi di matra hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang diandaikan dapat menjawab dan beriringan dengan melemahnya sistem sosial — suprastruktur dan infrastruktur, belum kunjung terwujud. Dalam konteks demikian, terjadi disparitas antara masyarakat dan Negara, yang keduanya bergerak terpisah dengan segala ekstrimitas yang tanpa aturan main.

Kenyataan ini pada umumnya dikonseptualisasikan sebagai produk *internal-imperealism* Orde Baru tiga dasawarsa. Bahwa politik —kebebasan berpikir dan berorganisasi— yang digariskan Orde Lama, telah diambil alih oleh rezim kapitalis. Rezim yang tegak di atas *dictatorship-authoritarianism* Soeharto beserta

kroninya. Basis interaksi dan komunikasi sosial berupa agama, ideologi, budaya dan tradisi, diabsorpsi ke dalam ideologi harmoni berupa tindakan teror, stigmatisasi sosial, kekerasan politik, yang berujung pada penghancuran total atas harkat martabat kemanusiaan. Akibat ekstrim dari alur sejarah ini adalah tragedi nasional 1965 yang sampai saat ini masih menyisakan nestapa dan kesengsaraan bagi mereka yang sebenarnya tak harus menanggungnya. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai sebuah kreasi antarkebudayaan dan pemikiran, tak lagi mendapat tempat dalam lembar-lembar sejarah Indonesia.

Akan tetapi, sejarah bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus bergerak mengikuti nalar perubahan dan semangat epistemik para pelakunya. Runtuhnya rezim Orde Baru adalah bukti nyata bahwa sejarah itu tidak berhenti di satu titik nadir. Dialektika sejarah bergerak melalui aras *kontinum-diskontinum*, kadangkala terjadi kesinambungan, kadangkala terputus sama sekali. Kini rezim hegemonik itu telah terkubur di bawah reruntuhannya sendiri. Namun, bukan berarti ia tidak meninggalkan sisa kekuatannya. Juga tidak serta merta problem akut yang sudah terlanjur tertanam secara paksa dalam tubuh bangsa ini, menjadi mudah dituntaskan. Akankah ia kita lupakan saja? Jawabannya tentu: TIDAK! Karena hal ini baru permulaan bagi keberlangsungan sejarah bangsa ini

untuk selanjutnya.

Setidaknya dari titik ini, dengan nada optimistik, barangkali masih ada pijar yang dapat menerangi perjalanan bangsa ke depan. Sebab ada kesediaan bersama untuk menghimpun kembali puing-puing retak sejarah, sambil saling mengoreksi keberadaan jatidiri masing-masing di masa lalu. Mengakui secara jujur kekeliruan-kekeliruan sebagai noktah merah sejarah yang tidak boleh terulang. Dan yang lebih penting, melepaskan bayang-bayang dendam politik masa silam, untuk mengawali lembaran baru dengan damai, tanpa maksud mengesampingkan hak-hak dasar kemanusiaan. *Rukun Agawe Santosa* (RUAS), mungkin adalah kalimat yang paling tepat di samping kata rekonsiliasi nasional, untuk melukiskan harapan besar tersebut.

Ada banyak cara untuk membuat perubahan

salah satunya terus berpikir dan berkerja bukan malah berpangku tangan

Sebesar-besar usaha adalah tetap bertahan hidup di bawah tekanan penguasa

Sebesar-besar semangat adalah tetap menulis dan bersuara meluruskan sejarah sekalipun digugat dan dihujat bahkan tidak diakui sebagai umat.6

⁶Dikutip dari editorial bulletin RUAS edisi III, Januari-Februari 2002.